

A'an Efendi
Freddy Poernomo

HUKUM ADMINISTRASI

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	043/mhk/10/C.1		
Th. Angg.	2019	Cat	C-1
PARAP	<i>Sm</i>	TGL.	16/07/2019



Penerbit

SINAR GRAFIKA



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
BAB 1 HUKUM ADMINISTRASI	1
A. Peristilahan	1
B. Pengertian	3
C. Hukum Administrasi sebagai Hukum Publik	20
D. Fungsi Hukum Administrasi	26
E. Pembagian Hukum Administrasi	28
F. Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara	30
G. Hukum Administrasi dan Ilmu Administrasi Negara	33
BAB 2 SUMBER HUKUM ADMINISTRASI	35
A. Pengertian Sumber Hukum	35
B. Macam-Macam Sumber Hukum Administrasi	38
1. Konstitusi	38
2. Peraturan Perundang-undangan	48
3. Putusan Pengadilan	52
4. Kebiasaan	56
BAB 3 ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI	58
A. Asas Legalitas	58
B. Asas Tiada Wewenang tanpa Pertanggungjawaban	61
C. Asas Praduga <i>Rechtmatig</i>	62

D. Asas <i>Contrarius Actus</i>	67
E. Asas Diam Berarti Menolak	70
BAB 4 RULE OF LAW DAN RECHTSSTAAT	79
A. Memahami <i>Rule of Law</i> dan <i>Rechtsstaat</i>	79
B. <i>Rule of Law</i>	83
C. <i>Rechtsstaat</i>	89
BAB 5 JABATAN, PEJABAT, DAN PENJABAT	92
A. Jabatan	92
B. Pejabat dan Penjabat	95
C. Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	101
D. Pegawai Negeri Sipil	106
BAB 6 WEWENANG	108
A. Pengertian	108
B. Sumber Wewenang	112
C. Wewenang Terikat dan Wewenang Diskresi	118
1. Wewenang Terikat	118
2. Wewenang Diskresi	119
D. Tindakan Tanpa Wewenang	124
E. Penyalahgunaan Wewenang	127
F. Tindakan Sewenang-wenang	132
G. Malaadministrasi	134
H. Dapat Dibatalkan, Batal, dan Batal Demi Hukum	138
I. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Putusan Pengadilan	143
BAB 7 ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	155
A. Pengertian dan Fungsinya	155
B. Macam-Macam AUPB	158
C. <i>Natural Justice</i>	166

BAB 8	GOOD GOVERNANCE	169
A.	Istilah dan Pengertian	169
B.	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	173
1.	Prinsip Keterbukaan	173
2.	Prinsip Akuntabilitas	173
C.	Segitiga Kekuasaan	174
D.	Fungsi Hukum Administrasi dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>	177
BAB 9	TINDAKAN PEMERINTAHAN	179
A.	Tindakan Pemerintahan	179
1.	Pengertian	179
2.	Macam-Macam Tindakan Pemerintahan	184
B.	Tindakan Hukum dan Tindakan Faktual	186
C.	Keputusan Tata Usaha Negara	188
1.	Peristilahan dan Pengertian	188
2.	Macam-Macam Keputusan	190
D.	Tindakan Berdasarkan Hukum Publik dan Hukum Perdata	192
E.	Kontrak Pemerintah	193
1.	Pengertian	193
2.	Macam-Macam Kontrak Pemerintah	197
F.	Perencanaan	199
BAB 10	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA DARI TINDAKAN PEMERINTAHAN	200
A.	Pengertian dan Fungsi Perlindungan Hukum	200
B.	Sarana Perlindungan Hukum	204
BAB 11	PRIMARY DAN DELEGATED LEGISLATION	207
A.	<i>Primary Legislation</i>	207

1.	Peristilahan dan Pengertian	207
2.	<i>Primary Legislation</i> di Indonesia	208
B.	<i>Delegated Legislation</i>	211
1.	Peristilahan dan Pengertian	211
2.	Dasar Diperlukannya <i>Delegated Legislation</i>	213
3.	Macam-Macam <i>Delegated Legislation</i>	216
4.	Hal Penting Terkait <i>Delegated Legislation</i>	217
5.	Kelebihan dan Kekurangan <i>Delegated Legislation</i>	219
6.	<i>Delegated Legislation</i> di Indonesia	221
BAB 12	PERATURAN KEBIJAKAN	224
A.	Peristilahan	224
B.	Pengertian	226
C.	Macam-Macam Peraturan Kebijakan	232
D.	Peraturan Kebijakan versus Peraturan Perundang-undangan	235
E.	Pengujian Peraturan Kebijakan oleh Pengadilan	241
F.	Kasus-Kasus	246
1.	Pengujian SE Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 terhadap Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	246
2.	Pengujian SE Direktur Jenderal Minerba dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 03E/31/D/JB/ 2009 Tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Minerba sebelum Terbitnya PP sebagai Pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	247
3.	Pengujian SE Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-118/PJ/2009 Tanggal 29 Desember 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Air Bersih	251
4.	Pengujian SE Direksi Perum Pegadaian No. 67/SP.300233/2008 Tanggal 17 September 2008 tentang Larangan Menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau	

Calon/Anggota Legislatif, Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-15/MBU/2008 Tanggal 31 Juli 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Peng- urusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara	256
--	-----

BAB 13 PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH 258

A. Pengertian	258
B. Fungsi Pengawasan	265
C. Berbagai Macam Pembedaan Pengawasan	268
D. Macam-Macam Pengawasan terhadap Pemerintah	271
1. Pengawasan Internal	271
2. Pengawasan Parlemen	274
3. Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan	281
4. Pengawasan Peradilan	284
5. Pengawasan Lembaga-Lembaga Independen	285
6. Pengawasan oleh Media Massa	291

BAB 14 PERAN SERTA MASYARAKAT 294

A. Pengertian	294
B. Berbagai Macam Mekanisme Peran Serta Masyarakat	298
C. Manfaat Peran Serta Masyarakat	299
D. Peran Serta Masyarakat di Indonesia	301

BAB 15 SANKSI ADMINISTRASI 303

A. Pengertian	303
B. Sifat Sanksi Administrasi	304
C. Asas Legalitas	305
D. Macam-Macam Sanksi Administrasi	306
1. Paksaan Pemerintahan	306
2. Uang Paksa	307

3. Denda Administrasi	308
4. Penghentian Sementara dan Pencabutan Izin	309
E. Penjatuhan Sanksi Administrasi dan Pidana Secara Bersamaan	310
F. Sanksi Administrasi Lainnya	311

DAFTAR PUSTAKA	313
-----------------------------	------------

PROFIL PENULIS	337
-----------------------------	------------